



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KEGIATAN BAKN DPR RI
MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2023-2024
(31 OKTOBER SAMPAI DENGAN 15 JANUARI 2024)**

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 27 September 2023 alokasi Waktu Rapat dalam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 yang dilaksanakan mulai tanggal 31 Oktober sampai dengan 15 Januari 2024, berjumlah 26 (dua puluh enam) hari kerja atau 36 (tiga puluh sembilan) hari kalender. Sedangkan Masa Reses dimulai tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan 15 Januari 2024, berjumlah 26 (dua puluh enam) hari kerja atau 41 (empat puluh satu) hari kalender.

Kegiatan BAKN DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 difokuskan pada kegiatan Pengawasan, yaitu rapat-rapat di BAKN DPR RI secara fisik dan melakukan kunjungan kerja ke daerah yang berkenaan dengan Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dan Lembaga/Badan lainnya dan untuk melihat secara langsung permasalahan dan kondisi yang ada di lapangan, dan kegiatan paket meeting dalam rangka mendapatkan masukan para pakar baik dari akademisi maupun praktisi terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) **pada BUMN dan Lembaga/Badan lainnya**.

Adapun hal-hal menonjol yang menjadi perhatian BAKN DPR RI di antaranya adalah sebagai berikut:

FUNGSI PENGAWASAN

Dalam fungsi Pengawasan BAKN DPR RI telah melakukan kunjungan kerja ke daerah yang berkenaan dengan Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN:

Rapat Pimpinan BAKN DPR RI, Rabu, 31 Oktober 2023 membahas Jadwal Acara Rapat Masa Persidangan II Tahun 2023 – 2024 dilanjutkan Rapat intern menetapkan Jadwal Acara Rapat Masa Persidangan II Tahun 2023 – 2024 mulai tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan 15 Januari 2024.

BIDANG PENGAWASAN

1. Kunjungan Kerja Pada Masa Persidangan ini dengan Tema “Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara pada BUMN dan Lembaga/Badan lainnya”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 disebutkan bahwa Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan sebagai modal Perusahaan Negara dan/ atau Perseroan Terbatas lainnya serta Lembaga/Badan

Lainnya, yang pengelolaannya dilakukan secara korporasi. Hal tersebut juga dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.06/2022 tentang Penyusunan Kajian, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyertaan modal negara pada perusahaan negara.

Lebih lanjut, penyertaan modal pemerintah pusat/daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. Adapun bentuk-bentuk PMN antara lain adalah Tunai, yakni Pemerintah memberikan sejumlah uang kepada BUMN; Konversi piutang Pemerintah yaitu Pemerintah mengkonversi utang BUMN kepada Pemerintah menjadi PMN; dan Hibah saham/aset dari pihak lain.

Lebih lanjut lagi, maksud dan tujuan penambahan PMN kepada BUMN tercantum dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-1/MBU/03/201 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Dari sisi anggaran, pada tahun 2022 Kementerian BUMN mengusulkan PMN kepada 12 BUMN dengan total Rp72,4 triliun.

Pada periode 2005-2021, total investasi pemerintah dalam bentuk PMN kepada BUMN sebesar Rp361,3 triliun dan kepada BLU sebesar 3 Rp334,3 triliun atau total sebesar Rp695,6 triliun. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 disebutkan realisasi pembiayaan PMN/Investasi pemerintah sebesar Rp113,46 triliun atau 72,99% dari anggaran Rp155,46 triliun. PMN ini antara lain terdiri atas PMN untuk BUMN, PMN pada organisasi/Lembaga keuangan internasional, PMN dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan PMN/Investasi lainnya.

Sementara itu, pada periode Tahun 2015-2018 diketahui terdapat 71 transaksi penyaluran PMN kepada 50 BUMN (4 di lingkungan Kementerian Keuangan dan 46 di lingkungan Kementerian BUMN). PMN diberikan dalam bentuk tunai maupun non tunai dengan total anggaran sebesar Rp125,40 triliun, yaitu tahun 2015 sebesar Rp64,88 triliun, tahun 2016 sebesar Rp50,53 triliun, tahun 2017 sebesar Rp6,37 triliun, dan tahun 2018 sebesar Rp3,60 triliun.

Lebih jauh, alokasi APBN pada 5 program prioritas nasional yang dibiayai dana penyertaan modal negara (PMN) tunai tahun 2015-2018 senilai Rp88,58 triliun sebanyak 41 BUMN (termasuk 5 anak perusahaan) dan realisasi penyaluran dana sebesar Rp88,57 triliun dan telah digunakan sebesar Rp79,4 triliun, terdapat sisa dana sebesar Rp8,93 triliun per 30 September 2019. program prioritas nasional tersebut sebagai berikut. 1. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas sebesar Rp62,41 triliun, antara lain ditujukan untuk pengembangan bandara, penyelesaian jalan tol strategis dan pembangunan jalan tol trans Sumatera, kawasan ekonomi khusus, proyek pembangkit listrik 35 GW, Infrastruktur LRT Jabodetabek. 2. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Kedaulatan Pangan sebesar Rp10,67 triliun ditujukan antara lain untuk mendukung program swasembada pangan, pengadaan benih, peningkatan produksi gula dan garam, serta peningkatan produksi ikan nasional. 3. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Pembangunan Maritim sebesar Rp 5,15 triliun, antara lain ditujukan untuk pengembangan kepelabuhan di Indonesia timur, penyediaan kapal penumpang dan kapal barang, perbaikan dan pengembangan terminal ferry, serta pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan kapal. 4. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Industri Pertahanan dan Keamanan, sebesar Rp 2,60 triliun antara lain ditujukan untuk peningkatan kapasitas produksi, modernisasi fasilitas produksi, mengantisipasi berkembangnya pasar, dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia. 5. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Kemandirian Ekonomi Nasional sebesar Rp

4,25 triliun, antara lain ditujukan untuk pembiayaan, penjaminan kredit usaha rakyat dan pendampingan UMKM.

Dari sisi audit/pemeriksaan, berdasarkan IHPS I Tahun 2022, BPK RI melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pengelolaan Program yang Dibiayai Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun 2015-2018 pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BUMN Penerima PMN di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara (LHP: 22 April 2021). Dari LHP tersebut terdapat 70 temuan senilai Rp383,97 miliar dan USD11.88 juta dengan 107 permasalahan dan 113 rekomendasi. Lebih detail lagi, permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian sebesar Rp166,48 miliar, potensi kerugian sebesar Rp30,18 miliar serta kekurangan penerimaan sebesar Rp86,49 miliar dan USD11.88 juta.

- a. Kunjungan Kerja ke Institut Pertanian Bogor Propinsi Jawa Barat tanggal 6 sampai dengan 8 Nopember 2023 Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dan Lembaga/Badan lainnya).

Saran dari Akademisi IPB untuk percepatan pemanfaatan modal yang diterima agar dapat meningkatkan efisiensi dan profitabilitas:

- 1) Penyertaan modal dengan tujuan penugasan dari pemerintah diberikan setelah dikaji dan ditetapkan kapan dan bagaimana penggunaannya.
- 2) Dana diberikan secara sekaligus habis selama satu periode anggaran, sehingga tidak perlu menunggu anggaran terkumpul di perusahaan.
- 3) Pembangunan yang cepat sehingga aset yang dibangun bisa segera dimanfaatkan.



Kunker BAKN DPR RI ke Institut Pertanian Bogor (IPB), Prov. Jawa Barat, 5-7 November 2023
Dalam rangka untuk mendapatkan masukan terkait Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI
terkait Penyertaan Modal Negara (PMN)

- b. Kunjungan Kerja ke Palembang Propinsi Sumatera Selatan tanggal 14 sampai dengan 17 Nopember 2023 Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dan Lembaga/Badan lainnya dengan PT. Hutama Karya dan PT. Bukit Asam.

Kesimpulan kunjungan kerja lapangan JTTS dengan PT Utama Karya (Persero) ke Ruas Palembang-Indralaya-Prabumulih, proyek JTTS yang dibiayai oleh PMN memberikan dampak:

- 1) Bagi Pemerintah:
 - a) Meningkatkan konektivitas di Pulau Sumatera.
 - b) Peningkatan Economic IRR dan fiskal selama masa konsesi.
- 2) Bagi Masyarakat:
 - a) Waktu tempuh perjalanan di Sumatera menjadi lebih efisien.
 - b) Penurunan biaya transportasi barang dan/atau manusia rata-rata sebesar 24,22%.
 - c) Penyerapan tenaga kerja selama masa konsesi di sepanjang koridor JTTS.
- 3) Bagi PT Utama Karya:
 - a) Struktur permodalan Perusahaan menjadi lebih kuat dalam melakukan pengusahaan jalan tol.
 - b) Financial IRR perusahaan menjadi lebih tinggi.



**Kunker BAKN DPR RI ke Palembang, Prov. Sumsel, 14-17 November 2023
Dalam rangka Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI
terkait Penyertaan Modal Negara (PMN)**

- c. Kunjungan Kerja ke Bandung Propinsi Jawa Barat tanggal 20 sampai dengan 22 Nopember 2023 Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) dengan PT. PINDAD

Kesimpulan kunjungan lapangan ke PT Pindad (Persero) di Bandung, Jawa Barat ialah sebagai berikut.

- 1) Bagi PT Pindad;
 - a) Sebagai perusahaan BUMN di holding DEFEND.ID/ pertahanan, dampak pemberian PMN yang lalu (TA 2012 dan TA 2015) telah memberikan nilai positif khususnya bagi peningkatan kapasitas produksi dan peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Selain itu dampak ekonomi-sosial juga dirasakan besar manfaatnya khususnya dalam hal pertumbuhan pendapatan, kemandirian dan peningkatan TKDN, penyerapan tenaga kerja, kontribusi pajak, ekosistem industri pertahanan serta modernisasi dan penguasaan teknologi tinggi.

b) Perusahaan memerlukan PMN TA 2023 dengan proyeksi pendapatan yang akan didapat lebih tinggi dibandingkan tanpa adanya PMN. Ke depannya, perusahaan juga sudah merencanakan alokasi penggunaan PMN untuk ekspansi. PMN ini menjadi sangat penting karena terkait dengan keamanan dan pertahanan negara. Selain itu perlu adanya modernisasi sesuai dengan perkembangan teknologi terbaru.

Terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam penggunaan PMN selama ini. Beberapa saran dan kebijakan terkait penambahan PMN juga disampaikan oleh perusahaan dalam agenda ini. Perusahaan perlu membuat peta jalan (roadmap) terkait kebutuhan anggaran di masa yang akan datang.

2) Bagi Pemerintah:

a) Dapat mendukung peningkatan kemandirian berdaya saing dalam rangka pengembangan industri pertahanan nasional yang kuat agar tidak bergantung dengan negara lain. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap alokasi PMN bagi perusahaan.

b) Memberikan potensi penerimaan negara yang besar dari sisi pajak serta peluang investasi dari luar negeri serta penyerapan tenaga kerja.

c) Perlu adanya dukungan penambahan PMN Tunai dan PMN Non Tunai terhadap perusahaan yang memerlukan dana PMN sebagaimana ketentuan yang berlaku.

3) Bagi Masyarakat: Adanya peluang penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kompetensi SDM.



Kunker BAKN DPR RI ke PT. PINDAD (PERSERO), Bandung, Prov. Jawa Barat, 20 - 22 November 2023
Dalam rangka Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN)

d. Kunjungan Kerja ke Bandung Propinsi Jawa Barat tanggal 26 sampai dengan 28 Nopember 2023 Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) dengan PT. Dirgantara Indonesia.

Kesimpulan kunjungan lapangan ke PT Dirgantara Indoensia Bandung, Jawa Barat adalah sebagai berikut.

1) Kajian atas Dampak Pemanfaatan PMN TA 2015, diantaranya merekomendasikan pemerintah untuk: Mendukung terus pengembangan Industri Strategis seperti PT Dirgantara Indonesia (PTDI) yang memiliki berbagai keunggulan melalui regulasi dan investasi secara berkelanjutan dan Mensinergikan PTDI dengan Instansi/Kementerian dan

Perusahaan terutama BUMN agar dapat memanfaatkan PTDI sebagai institusi unggul dan terpercaya serta memprioritaskan pembelian produk/pesawat sejenis dari PTDI, dibandingkan dengan membeli dari luar.

- 2) Tingkat produksi dan efisiensi PT DI masih di bawah 50 persen. Permasalah utamanya bukan PTDI tidak mampu memproduksi pesawat, akan tetapi karena faktor pemasarannya yang belum maksimal sehingga tidak bisa memproduksi pesawat. BAKN mendorong agar pemasaran yang dilakukan PTDI dapat maksimal. Sehingga, kapasitas produksinya bisa optimal.
- 3) Kegiatan kunjungan lapangan bertujuan untuk mendalami permasalahan yang dihadapi PTDI, sehingga BAKN DPR RI bisa menilai apa yang bisa dibantu terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diterima PTDI bisa lebih bermanfaat dan berdaya guna. BAKN DPR RI berharap Industri kedirgantaraan Indonesia diharapkan bisa berdampak meningkatkan ekonomi.



Kunker BAKN DPR RI ke PT. DIRGANTARA INDONESIA (PT. DI), Bandung, Prov. Jawa Barat, 26 - 28 November 2023
Dalam rangka Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN)

2. Kegiatan Paket Meeting dalam rangka mendapatkan masukan dari para Pakar

- a) Rapat Paket Meeting dengan Nurkholis SE., ME Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah FEB UI Kamis-Sabtu tanggal 10 sampai dengan 12 Nopember 2023 membahas untuk mendapatkan masukan mengenai Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dan Lembaga/Badan lainnya.
- b) Rapat Paket Meeting dengan Pakar Sigit Pramono, Ph.D Direktur Eksekutif RETaS Institute Kamis-Sabtu tanggal 24 sampai dengan 26 Nopember 2023 membahas untuk mendapatkan masukan mengenai Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dan Lembaga/Badan lainnya.
- c) Rapat Paket Meeting dengan Pakar Dr. Rahmat Direktur Eksekutif RETaS Institute, Kamis-Sabtu tanggal 30 November sampai dengan 2 Desember 2023 membahas untuk mendapatkan masukan mengenai Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dan Lembaga/Badan lainnya.
- d) Rapat Paket Meeting dengan Pakar Septian Hari Seto (Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Senin-Rabu tanggal 4 sampai dengan 6 Desember 2023 membahas

untuk mendapatkan masukan mengenai Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dan Lembaga/Badan lainnya.